

## Korupsi

### BPK Kejar Temuan Rp 8 Miliar APBD Sintang

PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar memastikan, terus mengejar temuan Rp8 miliar dana APBD Sintang yang dipergunakan anggota DPRD Sintang tahun 2004-2009.

"Temuan itu akan tetap kita tagih," kata Adi Sudiby, Kepala BPK Perwakilan Kalbar ditemui di sela kegiatan sosialisasi Peraturan BPK, di Hotel Aston Pontianak, Selasa (20/4).

Adi menegaskan, pihaknya sudah mengundang Pemkab Sintang guna menjelaskan temuan tersebut. "Kita memberikan mereka pengertian," ucapnya.

Dikatakannya, temuan-temuan Rp8 miliar, antara lain menyangkut dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) yang belum seluruhnya dikembalikan. Item lainnya ada juga yang menyangkut perjalanan dinas anggota dewan. "Kita harapkan Pemda Sintang segera bergerak," tukas Adi.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPRD Sintang periode 2004-2009, Antonius Situmorang mengungkapkan, tidak mengetahui secara pasti temuan BPK RI Rp8 miliar, untuk item apa saja.

■ Halaman 7

## BPK Kejar

.... dari halaman 1

"Ketika itu, kita hanya mendapat Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI). Jumlahnya Rp2 miliar saja. Kalau yang menjadi temuan BPK Rp8 miliar, saya jelas tidak mengetahuinya," katanya dihubungi Equator via selular, Rabu (20/4).

Terkait TKI, kata Anton, anggota DPRD Sintang periode 2004-2009 masih dalam proses

pengembalian. Bahkan sudah ada yang lunas membayar. "Sekarang tahap pengembalian, ada yang sudah lunas, dan saya masih nyicil. Jumlahnya ya sekitar Rp60 sampai Rp80 juta per orang," kenang Anton.

Temuan BPK Rp8 miliar, kemungkinan akumulasi dari dana yang diterima anggota DPRD Sintang periode 1999-2004.

Mengenai TKI sendiri diakui Anton, sesungguhnya ada payung hukum yang mengatur seperti PP nomor 110 tahun 2000, tentang keuangan DPRD. Kemudian digantikan dengan PP nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler keuangan pimpinan dan anggota DPRD, yang kemudian di perbaharui menjadi PP nomor 37 tahun 2005.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Equator, temuan BPK-RI senilai Rp 8 miliar merupakan akumulasi dari dana mengenai Otonomi Daerah (OTDA) yang diterima oleh anggota periode 1999-2004. Selain itu dana Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) untuk anggota periode 2004-2009. (jul/bdu)